



PENGEMBANGAN SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI YANG RESPONSIF, ADAPTIF DAN ANTISIPATIF

OLEH:
TEGUH SETYABUDI
KEPALA BPSDM KEMENDAGRI



SEKILAS INFO

TEGUH SETYABUDI



HP. 0811858973

Purwokerto, 8 Maret 1967

ALAMAT KANTOR
JL. TMP KALIBATA NOMOR 8
JAKARTA SELATAN

JABATAN SAAT INI
KEPALA BPSDM KEMENDAGRI

PANGKAT / GOL. PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

RIWAYAT PEKERJAAN

NO	PENUGASAN	TAHUN
1.	Direktur di Ditjen Otda	2014-2016
2.	Karo Umum Kemendagri	2010-2014
3.	Bandiklat Kemendagri	1993-2010

KEDIKLATAN YG PERNAH DIIKUTI

NO	JENIS KEDIKLATAN	TAHUN
1.	Diklat Pim Tk. II	2007
2.	Diklat Pim Tk. III	2003
3.	Diklat Pim Tk. IV	1997
Berbagai Diklat Teknis & Fungsional		- Sampai saat ini

EMAIL : ts_please@yahoo.co.id



**NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

Negara yang begitu BESAR

ts_please@yahoo.co.id



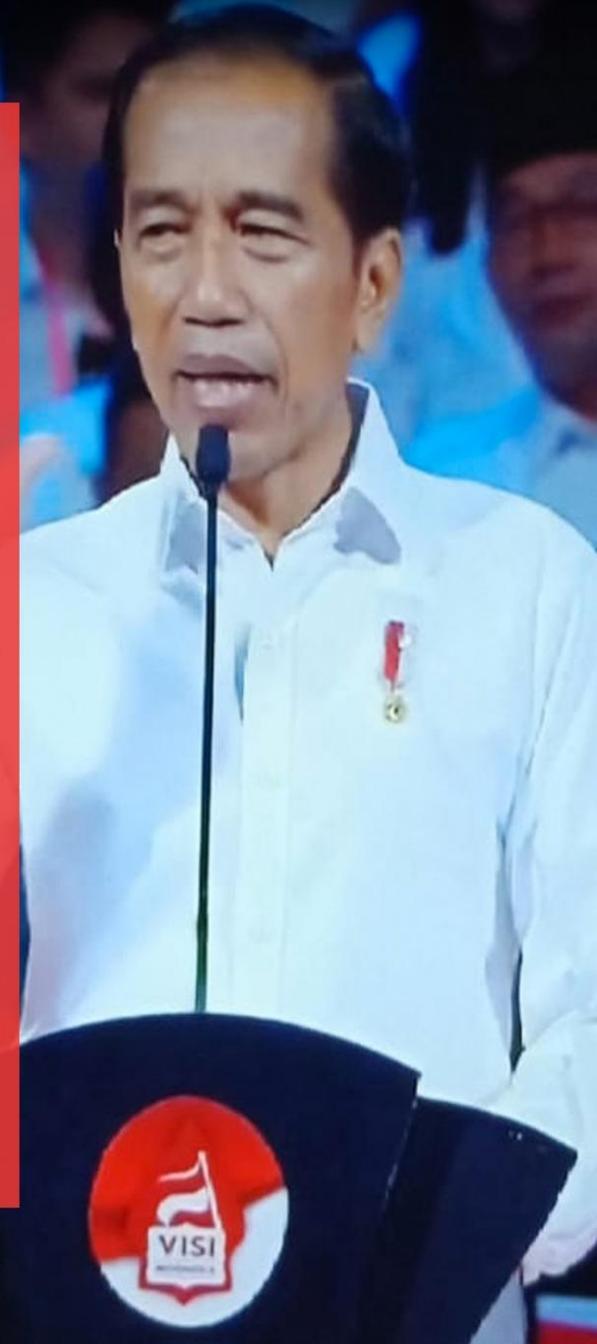
KITA ADALAH NEGARA BESAR

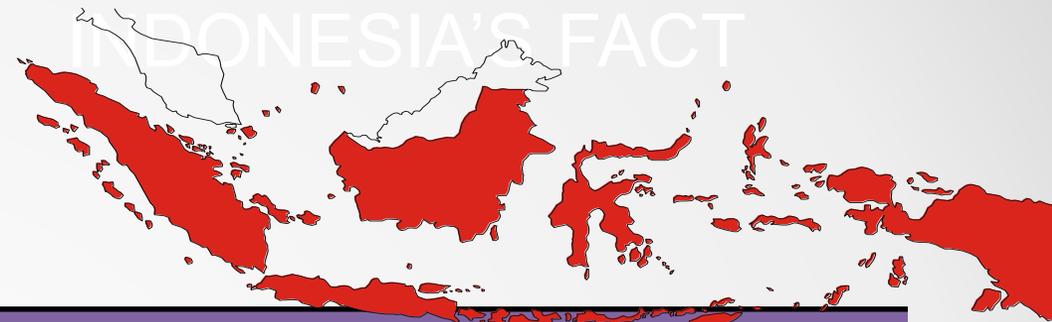
“Negara dengan 17 ribu pulau. Dengan letak geo-politik yang strategis. Kita adalah negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika! **Memiliki kekayaan budaya yang luar biasa.** Demografi kita juga sangat kuat! Jumlah penduduk 267 juta jiwa yang mayoritas di usia produktif. Kita harus Optimis

Presiden Jokowi
Sentul International Convention Centre
Minggu, 14 Juli 2019

“KITA HARUS TERUS
MEMBANGUN
INDONESIA YANG
ADAPTIF, INDONESIA
YANG PRODUKTIF, DAN
INDONESIA YANG
INOVATIF, INDONESIA
YANG KOMPETITIF.”

Presiden Jokowi
dalam pidato Visi Indonesia,
14 Juli 2019





Motto: Bhinneka Tunggal Ika
“Unity in Diversity”

Capital	Jakarta
Official languages	Indonesia
Spoken Languages	Indonesian, Slang, 700 living local langauges
Government	Republic
Total Provinces, distric/city	34 Provinces , 508 distric/cityl
Populations	266,794,980 (Mei, 2018)
Religions	Muslim , Protestant , Roman Catholic, Hindu, Buddhist, other
Area	Sea : 3.273.810 sq km Land : 1,811,569 sq km Water : 93,000 sq km
Ethnic Groups	Javanese 40.1%, Sundanese 15.5%, Malay 3.7%, Batak 3.6%, Madurese 3%, Betawi 2.9%, Minangkabau 2.7%, Buginese 2.7%, Bantenese 2%, Banjarese 1.7%, Balinese 1.7%, Acehnese 1.4%, Dayak 1.4%, Sasak 1.3%, Chinese 1.2%, other 15% (2010 est.)

NEGARA INDONESIA IBARAT SEBUAH BAHTERA YANG BESAR YANG MENGARUNGI SAMUDERA MAHA LUAS DENGAN GELOMBANG YANG GANAS

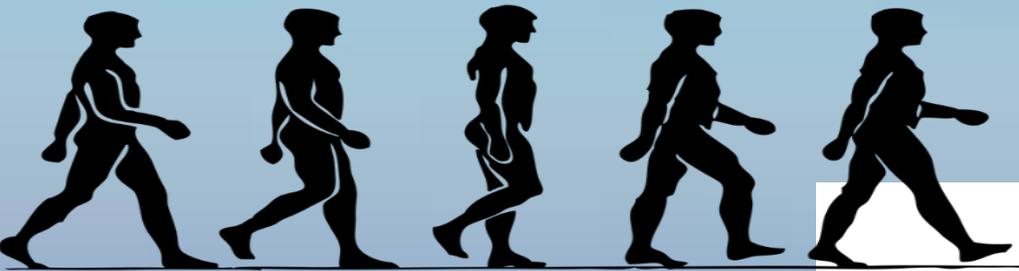


**Kapal besar , dengan penumpang banyak,
Indah, nyaman dan tentu punya tujuan**



**Yang harus mengarungi samudera luas,
gelombang yang ganas, badai dan
tantangan lainnya**

TIDAK BISA DENGAN CARA2 BIASA



INOVASI DALAM MENCARI SOLUSI

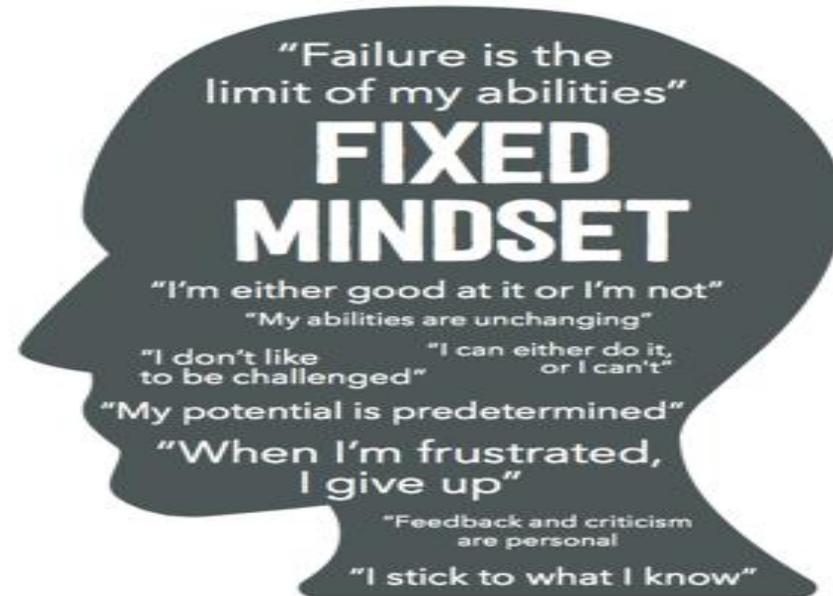
“Kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah. Dengan INOVASI-INOVASI, kita semuanya harus mau dan akan saya paksa untuk mau.”

Presiden Jokowi
dalam pidato Visi Indonesia,
14 Juli 2019



Darius Tiesati

HARUS MAMPU MERUBAH POLA PIKIR KITA

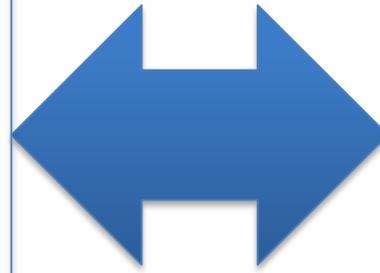


**CHANGE
YOUR
MINDSET**



KITA HARUS BERUBAH

TAHUN 90 AN



SAAT INI



TAK ADA LAGI POLA PIKIR LAMA, HARUS BERUBAH!

“Tidak ada lagi pola pikir lama!
Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada
lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi
kerja monoton, tidak ada lagi kerja
di zona nyaman. HARUS
BERUBAH!”

Presiden Jokowi
dalam pidato Visi Indonesia,
14 Juli 2019





➔ OTONOMI DAERAH
➔ GLOBALISASI

➔ REVOLUSI INDUSTRI 4.0
➔ INDONESIA EMAS 2045

TUJUAN OTONOMI DAERAH

(UU 23 Tahun 2014)



Keberhasilan pencapaian Tujuan Otda sangat ditentukan oleh KDH, DPRD, beserta perangkat Daerah dan ASN pada Perangkat Daerah.



PEMBAGIAN URUSAN

PENGEMBANGAN SDM APARATUR PEMDA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN



CONCURRENT

ABSOLUT

- PERTAHANAN
- KEAMANAN
- MONETER DAN FISCAL NASIONAL
- YUSTISI
- POLITIK LUAR NEGERI
- AGAMA

UMUM

- KEWENANGAN PRESIDEN SBG KEP. PEMERINTAHAN TERKAIT DENGAN IDEOLOGI PANCASILA, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA, MENJAMIN HUBUNGAN YG SERASI BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN.

PASAL 25 AYAT 1
UU NO. 23/2014

PILIHAN

- KELAUTAN DAN PERIKANAN
- PARIWISATA
- PERTANIAN
- KEHUTANAN
- ESDM
- PERDAGANGAN
- PERINDUSTRIAN
- TRANSMIGRASI

NSPK DAN INOVASI (pasal 17 (2))

NSPK DAN INOVASI

WAJIB

PELAYANAN DASAR

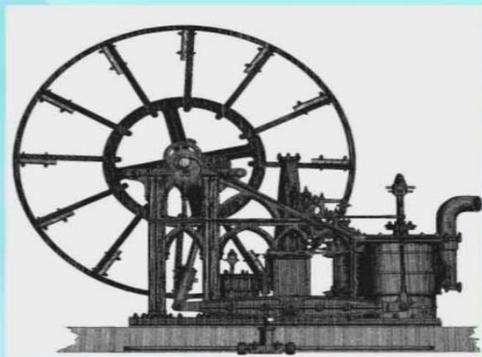
- PENDIDIKAN
- KESEHATAN
- PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
- PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
- TRAMTIBUM LINMAS
- SOSIAL

SPM (STANDARD PELAYANAN MINIMAL) DAN INOVASI

NON PELAYANAN DASAR

- TENAGA KERJA
- PPPA
- PANGAN
- PERTANAHAN
- LINGK. HIDUP
- ADMINDUK
- PEMAS
- PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
- PERHUBUNGAN
- KOMINFO
- KOPERASI, UKM
- PENANAMAN MODAL
- KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
- STATISTIK
- PERSANDIAN
- KEBUDAYAAN
- PERPUSTAKAAN
- DAN KEARSIPAN

REVOLUSI INDUSTRI



ABAD 18

Industri 1.0
mekanisasi produksi dengan mesin bertenaga uap



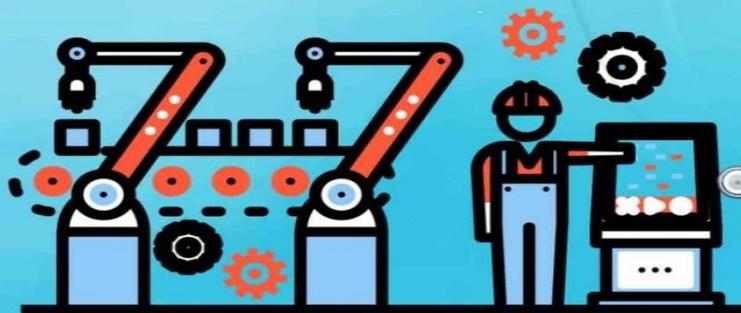
ABAD 19

Industri 2.0
terciptanya alur produksi massal dan penggunaan listrik



ABAD 20

Industri 3.0
penggunaan robot dalam proses produksi dan perkembangan teknologi informasi



ABAD 21

Industri 4.0
intelligent production, melalui internet of things (IoT), pemanfaatan big data dan cloud technology

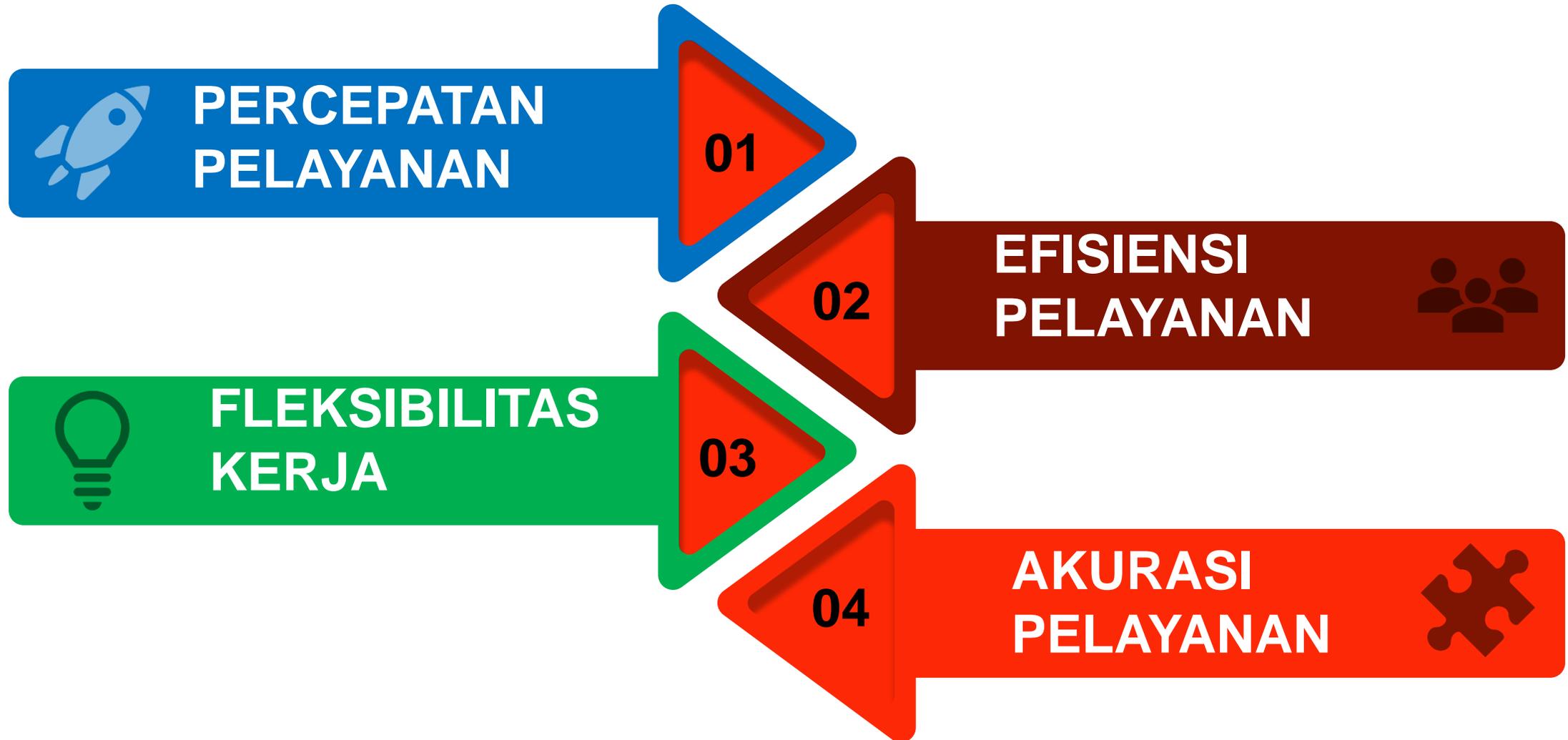
PEMERINTAH SIAP MENUJU **DIGITAL GOVERNMENT**



Digitalisasi dalam administrasi publik mendorong pemerintah berinovasi dalam penyediaan layanan khususnya smart city yang praktis, mudah diakses serta bersifat online sehingga pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat



BIROKRASI 4.0



Dalam pemikiran Presiden Joko Widodo, ***investasi bukan hanya urusan pembangunan infrastruktur saja, tapi ada yang lebih penting, yakni investasi sumber daya manusia (SDM)*** untuk wujudkan visi besar menuju **Indonesia Emas di 2045**

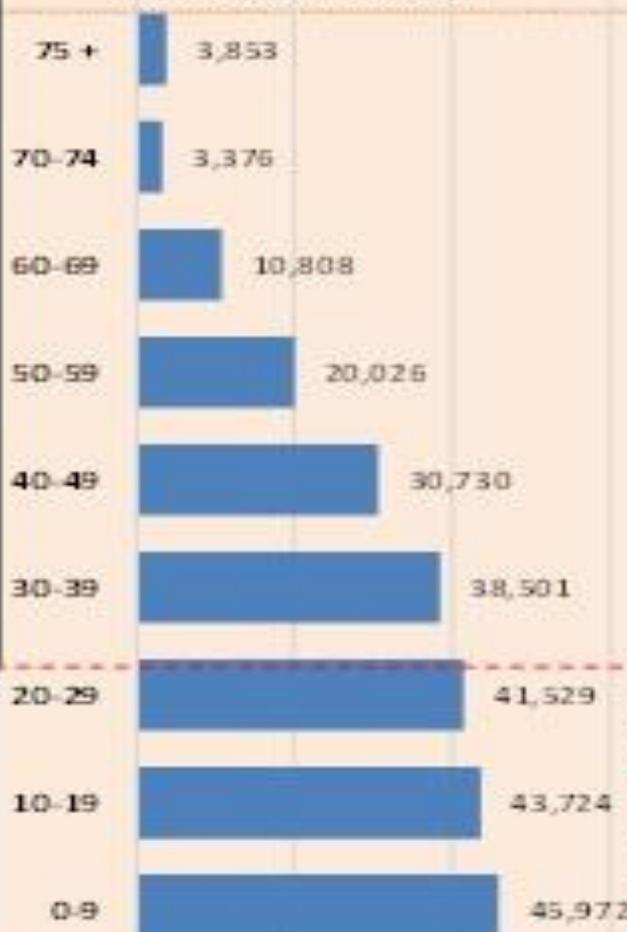


Menuju Indonesia Emas
100 Tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia
Tahun 2045

untuk negriku
INDONESIAKU

Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka

Struktur Penduduk Indonesia 2010



Jumlah Penduduk:
238,5 Juta orang

Periode Bonus Demografi 2005-2035

Pendidikan dan Kesehatan
Pastikan setiap anak bangsa mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan Kesehatan

Generasi 100 thn Merdeka (Usia pada tahun 2045)

55-64 tahun

45-54 tahun

35-44 tahun

Generasi Pemegang Kunci Kejayaan Indonesia

PBPU yang menggunakan istilah BPS-Sakernas 2016

"penduduk berusaha sendiri" 43,7 jt adalah :

pendapatan rata-rata 1,7 juta rupiah sebulan, dengan pendidikan 64% sampai sekolah menengah, dan sudah menikah 70 % serta 54% berusia muda (20 sd 44) tahun.

Kelompok umur

INDONESIA EMAS TAHUN 2045

INDONESIA

2045

Become
an Advanced
Economy

PROSPEK



DEMOGRAPHY

- 309** Juta jiwa
- 52%** Usia produktif
- 75%** Tinggal di kota
- 80%** Kelas menengah



EKONOMI

- No. 4 PDB teratas di dunia
- Penghasilan per kapita US \$ 29.300
- Pergeseran menuju sektor yang lebih produktif
- Tumbuhnya sektor jasa

PRASYARAT



KESIAPAN
INFRASTRUKTUR



KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA



KESIAPAN
TEKNOLOGI



PERENCANAAN SPASIAL



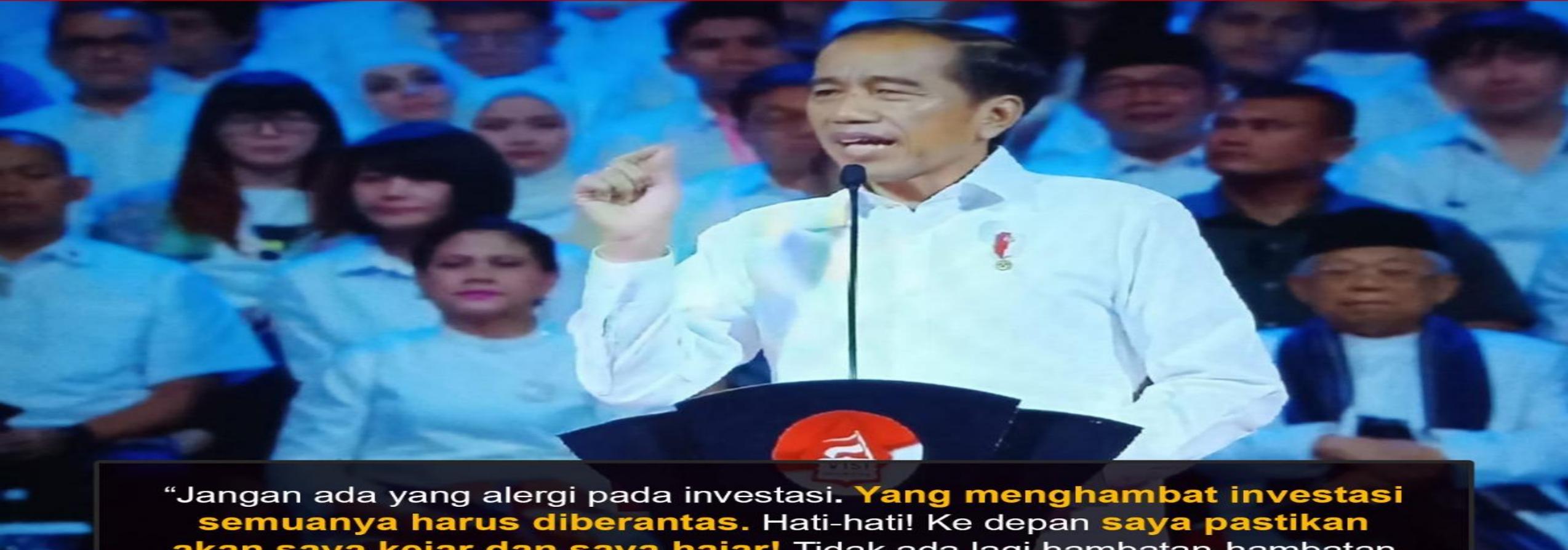
EKONOMI & FINANSIAL
SUMBER DAYA (APBN Sehat)
STABILITAS MAKRO
STABILITAS POLITIK
ATURAN HUKUM



➡ **Kemudahan Berinvestasi**
➡ **Daya Saing**



Pidato Presiden Joko Widodo:
VISI INDONESIA
5 TAHUN KE DEPAN



“Jangan ada yang alergi pada investasi. **Yang menghambat investasi semuanya harus diberantas.** Hati-hati! Ke depan **saya pastikan akan saya kejar dan saya hajar!** Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan.”

Presiden Jokowi
Sentul International Convention Centre
14 Juli 2019

PERNYATAAN PRESIDEN PADA APRIL TAHUN 2019

KEMUDAHAN INVESTASI DI INDONESIA MENAGALAMI LONCATAN
YANG CUKUP TINGGI DARI PERINGKAT 120 MENJADI PERINGKAT 72

ISTANA BOGOR, 23 APRIL 2019



DAYA SAING INDONESIA TINGKAT GLOBAL

Global competitiveness rankings of Asia-Pacific countries/regions in 2018

Ranking within Asia-Pacific		Global ranking		Ranking within Asia-Pacific		Global ranking	
		2017*	2018			2017*	2018
11	Indonesia	47 (36)	 45	16	Sri Lanka	81 (85)	 85
12	Philippines	68 (56)	 56	17	Mongolia	95 (101)	 99
13	India	63 (40)	 58	18	Bangladesh	102 (99)	 103
14	Brunei	64 (46)	 62	19	Pakistan	106 (115)	 107
15	Vietnam	74 (55)	 77	20	Nepal	108 (88)	 109

*Numbers in parentheses indicate 2017 rankings using previous ranking system
Source: World Economic Forum

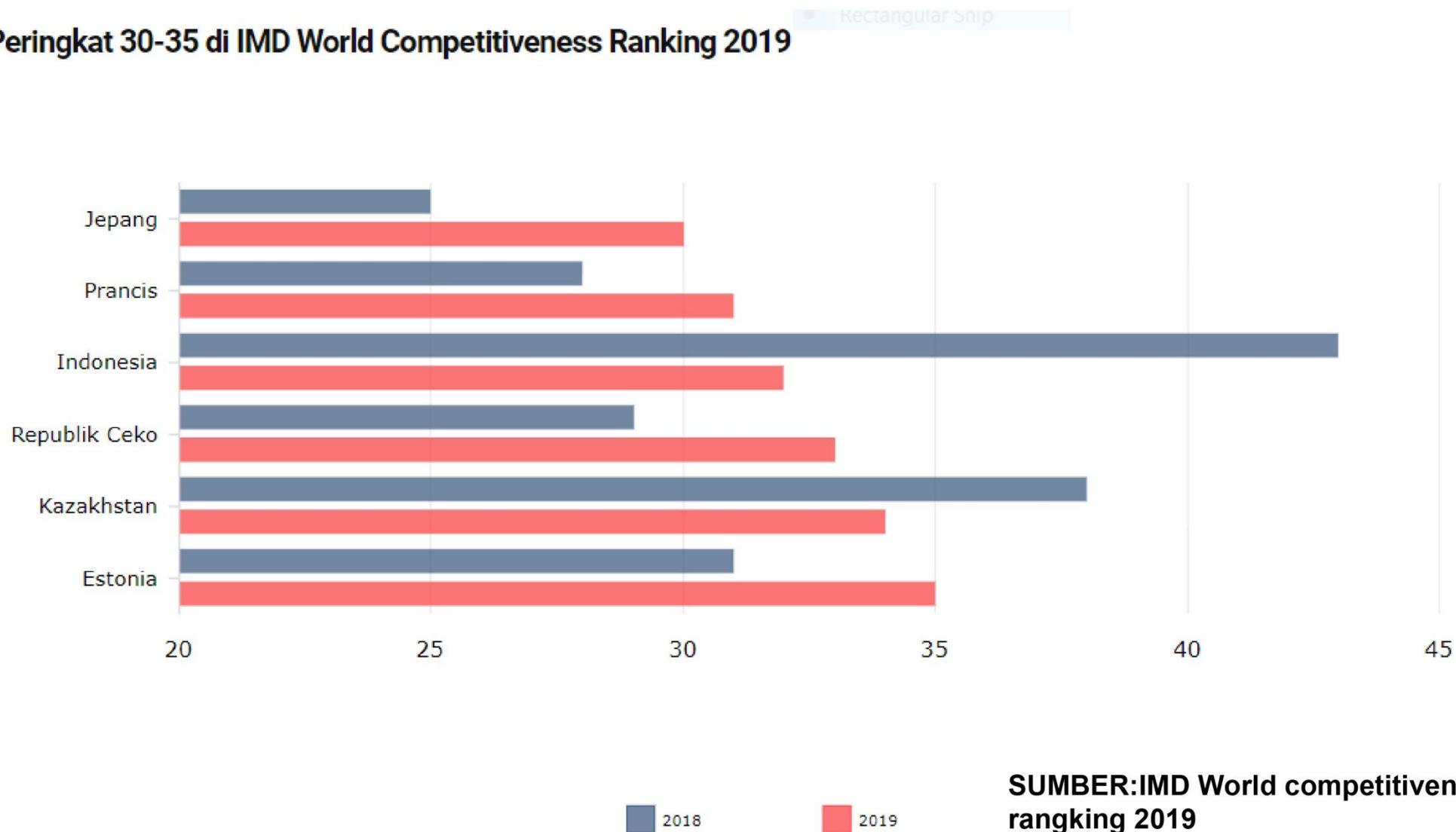


Global Competitiveness Index (GCI) 2018 yang dirilis World Economic Forum (WEF) pada 16 Oktober 2018 **menempatkan indeks daya saing Indonesia di peringkat 45 dari 140 negara**. Peringkat tersebut mengalami perbaikan karena tahun sebelumnya menduduki posisi 47.

GLOBAL COMPETITIVNESS RANK

**INDONESIA MELEJIT KE POSISI 32 YG SEBELUMNYA DI THN 2018
PD POSISI 43 DUNIA, INDONESIA BERADA DI POSISI 32
SETELAH JEPANG DAN PERANCIS**

Peringkat 30-35 di IMD World Competitiveness Ranking 2019

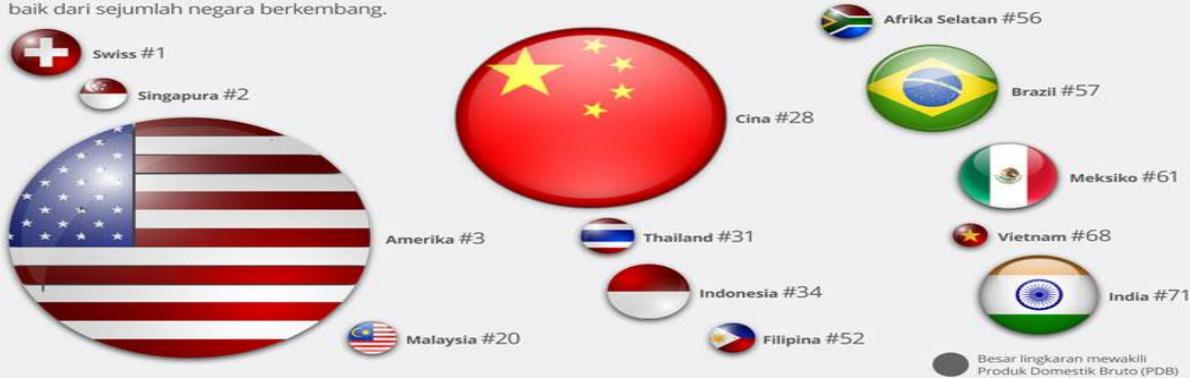


Infrastruktur Membaik Indonesia Naik Kelas

Perbaikan infrastruktur dan konektivitas dalam empat tahun terakhir, membuat daya saing Indonesia naik 4 tingkat di level global menjadi urutan ke-34 versi World Economic Forum. Namun di kawasan ASEAN, Indonesia masih tetap di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Indonesia di Peta Daya Saing Dunia

Indonesia masih kalah dari negara-negara maju, namun lebih baik dari sejumlah negara berkembang.



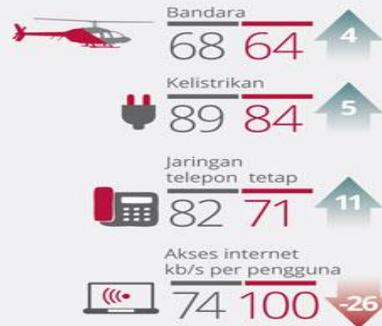
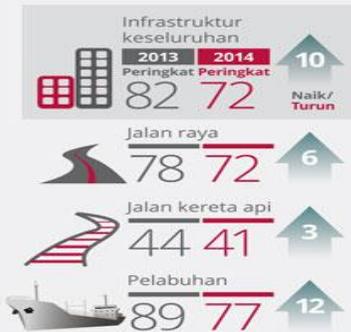
Infrastruktur Naik Peringkat

Kondisi infrastruktur, baik menyangkut jalan raya, rel kereta, pelabuhan, bandara dan jaringan telepon kian membaik.



"Infrastruktur kita masih banyak masalah, tapi ada kemajuan pesat dalam 5 tahun terakhir."

Armida Alisjahbana,
Kepala Bappenas



- Indonesia menempati urutan ke-34 dalam indeks daya saing global yang dipublikasikan oleh **World Economic Forum (WEF)**.
- Peringkat tersebut naik 4 tingkat dibanding tahun lalu.
- Menurut WEF, **peningkatan terjadi karena perbaikan Infrastruktur di Indonesia** yang tercatat naik 5 peringkat di bandingkan tahun lalu dan naik 20 peringkat dibanding posisi tahun 2011.

FAKTOR PENENTU DAYA SAING NASIONAL (PORTER, 2005)

ECONOMIC PERFORMANCE



- Ekonomi domestic
 - Perdagangan internasional
 - Investasi internasional
- Harga pekerjaan



- Produktivitas
- Pasar pekerja
- Keuangan
- Praktik manajemen
- Sikap dan nilai-nilai

BUSINESS EFFICIENCY

GOVERNMENT EFFICIENCY

- Keuangan public
- Kebijakan fiscal
- Kerangka Kerja institusi
- UU Bisnis
- Kerangka Kerja Sosial



- Infrastruktur dasar
- Infrastruktur teknologi
- Infrastruktur ilmiah
- Kesehatan dan lingkungan



INFRASTRUCTURE

PERMASALAHAN DAYA SAING

01 – PENGHAMBAT DAYA KOMPETISI

- Masalah pungutan
- Pemogokan menurunkan nilai investasi asing
- Modal kerja (sulitnya aliran kredit)
- Meningkatnya biaya operasi karena masalah keamanan



02 – PERMASALAHAN STRUKTURAL INDUSTRI INDONESIA

- Tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli baik terselubung maupun terang-terangan
- Lemahnya hubungan intra industry
- Masih kakunya BUMN sbg pemasok input maupun sebagai kemajuan teknologi
- Investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestic dan sasaran sebagian besar masih pada pasar yang diproteksi



03 – PENURUNAN KINERJA EKSPOR

- Ekonomi biaya tinggi
- Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah (ekspor turun)
- Masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada 3 negara utama yaitu USA, JPN, dan SING.
- Keragaman ekspor yang masih rendah
- Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitas, terutama kepada eksportir dan menengan
- Lemahnya sistem jaringan dan distribusi nasional



04 – DAYA TARIK PARIWISATA

- Hambatan dari munculnya berbagai regulasi baik di pusat maupun di daerah sebagai dampak transisi pelaksanaan otonomi daerah
- Masih lemahnya pengelolaan sebagian besar daerah tujuan wisata dan asset-asset warisan budaya
- Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan pemasaran dan promosi pariwisata terutama ke masy. Internasional.



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TAHUN 2018

Berita Resmi Statistik No. 32/04/Th. XXII, 15 April 2019

Angka Harapan Hidup
Saat Lahir
71,20 tahun



IPM 71,39
TAHUN 2018



Rata-rata Lama Sekolah
8,17 tahun
Harapan Lama Sekolah
12,91 tahun



Pengeluaran Per Kapita
Per Tahun yang Disesuaikan
Rp11.059.000,00

Mendagri : Penghargaan Inovasi Daerah (IGA), Bukti Bahwa Pemimpin Daerah Telah Bersinergi Positif

Filosofi inovasi kepada daerah diberikan untuk membuat daerah menjadi *Smart city and Smart Regional* sebagai cikal bakal Pemerintah Indonesia yang *Smart Government*

Penghargaan IGA 2018 dianugerahkan kepada:

- 3 pemerintah provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat);
- 10 pemerintah kabupaten, dan 10 pemerintah kota, 2 daerah tertinggal, dan 2 daerah perbatasan (Banyuwangi, Padang Pariaman, dan Gresik. Begitu juga dengan pemerintah kota dengan nilai tertinggi diraih oleh Bandung, Makassar, dan Malang)





 **PENGEMBANGAN SDM**



**“Kita akan memberikan
prioritas pembangunan
kita pada pembangunan
sumber daya manusia.
Pembangunan SDM menjadi
kunci Indonesia ke depan.”**



Presiden Jokowi
Sentul International Convention Centre
14 Juli 2019

AMANAT PRESIDEN JOKO WIDODO

FOKUS 2019 : INVESTASI SDM



“Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional”



Pembangunan sumber daya manusia menitikberatkan pada 3 Hal yaitu:

2

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik

PEMBANGUNAN KARAKTER POSITIF

ada program komprehensif terkait karakter positif yang menyentuh pendidikan anak, bahkan sejak anak usia dini

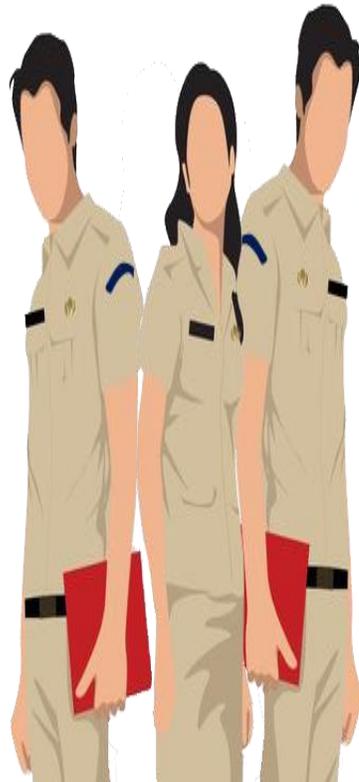
3

MENDORONG *link and match* antara INDUSTRI DENGAN PENDIDIKAN

ASN tersebar
di **daerah**


Instansi Pusat
22,4% (939,236 jiwa)


Instansi Daerah
77,6% (3,246,267 jiwa)



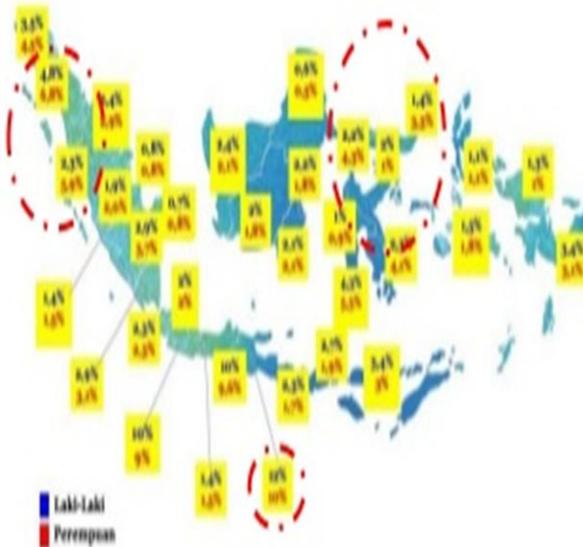
Pulau Jawa masih menjadi
titik sentral pemusatan ASN



KONDISI UMUM ASN

Beberapa daerah masih terjadi ketimpangan gender ASN


Laki-Laki
49%
(2,050,896 jiwa)




Perempuan
51%
(2,134,607 jiwa)

ASN didominasi lulusan Diploma IV/S-1 dan SMA



Sekolah Dasar
0,7% (29,862 jiwa)

Sekolah Menengah Pertama
1,3% (53,787 jiwa)

Sekolah Menengah Atas
20,6% (861,989 jiwa)



Diploma I
1,0% (42,615 jiwa)

Diploma II
4,2% (174,656 jiwa)

Diploma III
9,4% (391,599 jiwa)



Diploma IV/Strata-1
53,3% (2,231,492 jiwa)

Strata-2
9,0% (378,220 jiwa)

Strata-3
0,5% (21,283 jiwa)



POTRET UMUM BIROKRASI DI INDONESIA (SAAT INI)



1

ORGANISASI

Organisasi gemuk, *fragmented* dan tumpang tindih fungsi

2

HUKUM

- Lemahnya penegakan hukum
- Peraturan Per-UU *overlapping*

3

SDM dan PELAYANAN

- SDM Aparatur kurang Kompeten
- Budaya Kinerja belum terbangun
- Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja
- Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah
- Integritas PNS yang masih rendah
- Pola pikir rule based
- Kualitas pelayanan publik masih rendah

4

PENGGUNAAN IT

- Penerapan e-government belum merata
- Belum IT *mind it*



Reformasi Birukrasi



Make it **fast**

Make it **right**

Make it **simple**

REFORMASI BIROKRASI

BIROKRASI LAMA → BIROKRASI BARU

Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap **SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN** berkaitan dengan aspek:

KELEMBAGAAN
(Organization)

KETATALAKSANAAN
(Business Process)

SUMBER DAYA
APARATUR (Human
Resources)



REFORMASI BIROKRASI



-  Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah
-  Pemerintah belum efektif dan efisien
-  Pelayanan publik masih buruk



- Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi 
- Pemerintah yang efektif dan efisien 
- Pelayanan publik yang baik dan berkualitas 



REFORMASI BIROKRASI AGAR LEMBAGA SEMAKIN LINCAH!

“Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi, tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!

Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif saya pastikan akan saya pangkas. Akan saya opot pejabatnya. Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah akan saya bubarkan!”

Presiden Jokowi
dalam pidato Visi Indonesia,
14 Juli 2019



Kondisi Pengembangan SDM ASN Saat Ini

Tenaga Spesialis Masih Terbatas



Hanya 10% ASN dengan jabatan JF Teknis (di luar guru dan tenaga medis) dibandingkan dengan 38% JF Umum/Admin dan 11% Struktural (BKN, 2016)

Ketidaksesuaian Antara Potensi Daerah dengan Kompetensi ASN Setempat



Hanya 0.06% ASN di Kalimantan dengan latar belakang perminyakan/pertambangan/geologi; hanya 0.1% ASN di Sulawesi berlatar belakang perikanan (Bappenas & Kemenpan RB, 2016)

Program Pengembangan Kompetensi Belum Sesuai Kebutuhan Daerah



Program pengembangan kompetensi seperti diklat cenderung membebani anggaran daerah karena tidak sesuai kebutuhan kompetensi di daerah sehingga tidak bermanfaat signifikan bagi pengembangan potensi daerah

Tumpang Tindih Pengembangan Kompetensi



Terdapat beberapa program pendidikan dan pelatihan yang disinyalir tumpang tindih substansinya sehingga membuat bingung daerah dan semakin membebani anggaran

MASALAH

01

DIKLAT YANG TDK SESUAI
KEBUTUHAN DAN BERSIFAT
RUTIN DAN KONVENSIONAL

02

KETERBATASAN
ANGGARAN

03

KOMITMEN KDH KURANG
UTK MENSUPPORT PENGEMBANGAN
SDM ASN

04

SARANA DAN PRASANA SERTA
INFRASTRUKTUR TIK MASIH KURANG

PENDEKATAN PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

PELATIHAN ASN

WORKSHOP

SEMINAR

COACHING KEPEGAWAIAN

MENTORING KEPEGAWAIAN

PERTUKARAN PEGAWAI & PRAKTEK KERJA

PELATIHAN MANAJEMEN ASN JABATAN STRUKTURAL

JPT PRATAMA

Studi Kasus & Praktek Terbaik
Masalah nyata dan contoh implementasi terbaik di lapangan.

ADMINISTRATOR

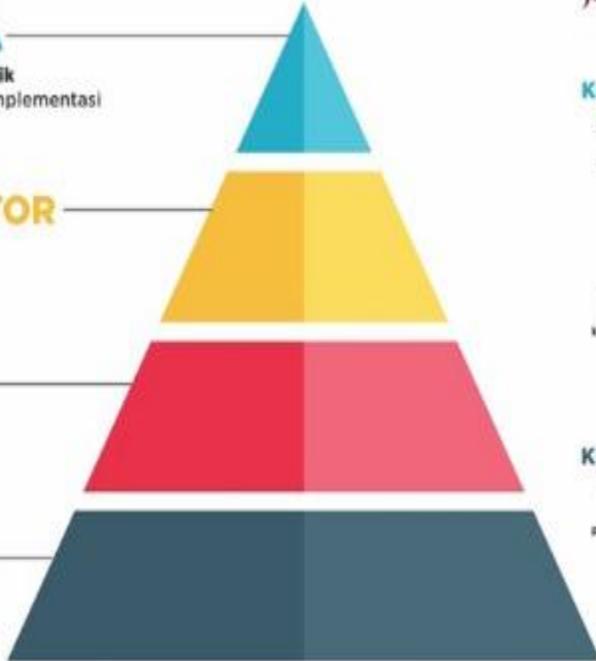
Sistem & Konsep
Konsep & sistem terbaru human capital.

PENGAWAS

Prosedur
Seluruh prosedur terkait manajemen ASN.

PELAKSANA

Regulasi
Seluruh regulasi terkait manajemen ASN.



PELATIHAN MANAJEMEN ASN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS KEPEGAWAIAN

Membangun kompetensi teknis dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Manajemen ASN.

AHLI

TERAMPIL

ASESOR SDM

Membangun kompetensi teknis dalam penilaian kompetensi manajerial SDM aparatur (soft skills).

AHLI

AUDITOR KEPEGAWAIAN

Membangun kompetensi teknis dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN.

AHLI

MEKANISME SERTIFIKASI MANAJEMEN ASN



E-MANAJEMEN PENGEMBANGAN ASN



GENERIC COMPETENCIES



TALENT PROFILING SES POOL	SOLID CONTRIBUTOR	PROMOTABLE	STAR
	SOLID CONTRIBUTOR	DEVELOPMENT	PROMOTABLE
	MISFIT	CONCERN	DEVELOPMENT

ASN TALENT



TALENT DEVELOPMENT CENTER



NATIONAL TALENT FOR INDOONESIAN CIVIL SERVICE



KOMPETENSI ASN (UU NO 5 TH 2014; ASN & UU NO 23 TH 2014: PEMDA

KOMPETENSI
TEKNIS

KOMPETENSI
MANAJERIAL

KOMPETENSI
PEMERINTAHAN

KOMPETENSI
SOSIO KULTURAL

PASAL 233 UU NO 23 TH 2014:

PNS ASN yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, selain harus memenuhi persyaratan kompetensi: teknis, manajerial dan sosial kultural, harus pula memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan.

Ketentuan ini juga berlaku terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator di bawah kepala perangkat daerah dan jabatan pengawas.

MANAJEMEN TALENTA INDONESIA UNTUK INDONESIA MAJU

“Kualitas pendidikan juga akan terus kita tingkatkan. Lewat *vacational training, vocational school*. Kita akan membangun lembaga Manajemen Talenta Indonesia. Kita akan mengelola talenta-talenta hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global.”

Presiden Jokowi
dalam pidato Visi Indonesia,
14 Juli 2019





**HARAPAN
DAN SOLUSI**

BAGAIMANA KITA MERESPON PENGEMBANGAN SDM YANG BERDAYA SAING



Kebutuhan Daerah

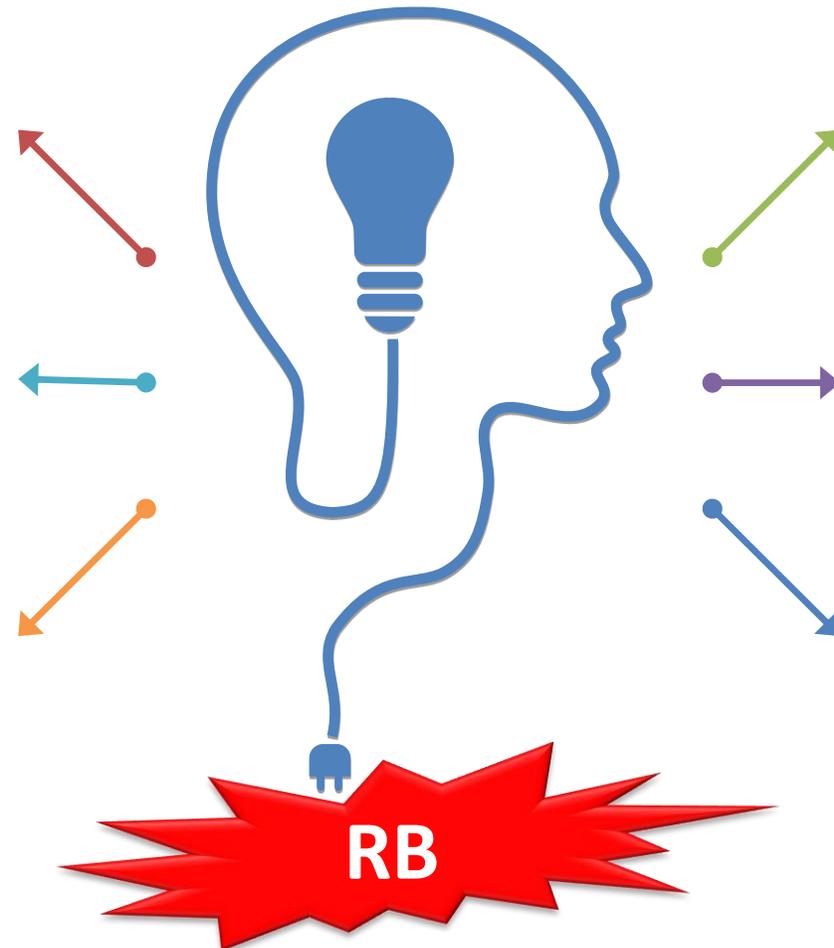
Pengembangan kompetensi SDM Aparatur di daerah hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi di daerah

Potensi Unggulan

Perlu dipertimbangkan prioritas untuk menyusun materi diklat yang sesuai dengan pengembangan potensi unggulan daerah

Kerja Sama Antar unit

Bekerja sama dengan UK lainnya di Kemendagri untuk penyusunan dan penyempurnaan materi



Training Needs Analysis

Mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan untuk menyusun Training Need Analysis (identifikasi kebutuhan diklat) dalam menentukan prioritas kebutuhan diklat

Inovasi

Senantiasa melakukan inovasi dalam *delivery method* dan materi program pendidikan dan pelatihan

Koordinasi Lintas K/L/D

Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L pusat terkait (e.g. LAN, Kemenpanrb) dan Pemda dalam penyusunan materi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM aparatur daerah agar tidak terjadi tumpang tindih

SOLUSI UTK ASPEK SUBSTANSI DAN CONTENT PEMBELAJARAN



SESUAI
KEBUTUHAN

SESUAI POTENSI DAERAH

SESUAI PRIORITAS KDH /
VISI DAN MISI KDH

BERSIFAT INOVATIF
DAN MARKETABLE

PENGEMBANGAN
CONTENT DIGITAL UTK
MENDUKUNG
PEMBELAJARAN

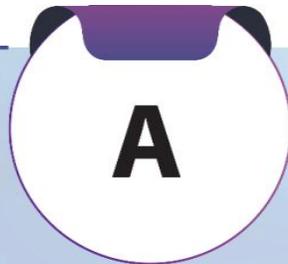


LAMPIRAN PERMENDAGRI 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

V. Hal Khusus Lainnya, antara lain pada nomor :
33. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019, untuk :

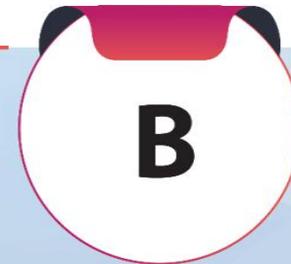
PEMENUHAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN PEGAWAI ASN

Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



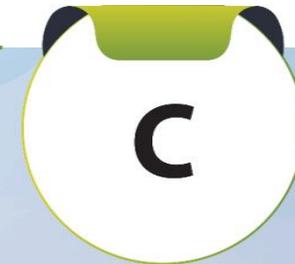
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL

Substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

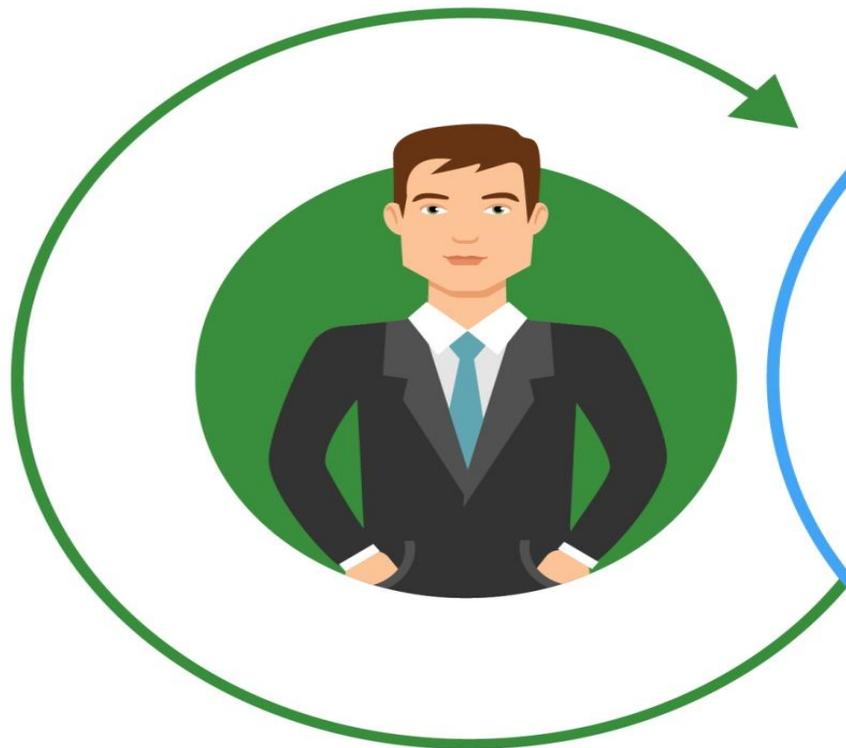


PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

Dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.



Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota.



PERAN KEMENTERIAN
LEMBAGA DAN
PEMERINTAH DAERAH



K/L

MELAKUKAN PEMBINAAN TEKNIS
SESUAI FUNGSI BINWAS MASING2 K/L
KHUSUSNYA DLM ASPEK PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN



PEMDA

MENYUSUN PROGRAM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
DAERAH DLM RANGKA MENDUKUNG
PERCEPATAN PEMDA DALAM
MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH

Jenis Pengembangan Kompetensi

JENIS
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

- ▶ **Pendidikan & Pelatihan**
- ▶ **Kursus**
- ▶ **Penatran**
- ▶ **Seminar**
- ▶ **Lokakarya**
- ▶ **Bimtek**
- ▶ **Pembelajaran Elektronik**
- ▶ **Magang**
- ▶ **Pelatihan dalam jabatan**
- ▶ **Pembekalan/Orientasi Tugas**
- ▶ **Pendalaman Tugas**



**PENGEMB
KOMPETENSI
URUSAN
PEMERINTHAN**

Laksanakan pengembangan kompetensi, baik dalam bentuk seminar, workshop, lokakarya, kursus, diseminasi, FGD, bimtek, e-learning atau diklat yang sesuai dengan kebutuhan daerah walau dalam kondisi anggaran terbatas

**HAL 2
CRUCIAL**

STRATEGIS

**DI AKHIR
2019**

**LSPDN – SERTIFIKASI
TALENT POOL**

**ORIENTASI TUGAS BAGI
ANGGOTA DPRD**

**INTEGRASI DIKLATPIM DG
DIKLAT PIMPEMDAGRI**

LATSAR CPNS

**DIKLAT P2UPD, SATPOL
DAN DAMKAR**

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA YANG RESPONSIF, ADAPTIF DAN ANTISIPATIF



ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Substansi materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan/potensi daerah/visi misi daerah/inovatif dan antisipatif



Adanya dukungan anggaran untuk Provinsi sebesar 0,34% dari total belanja daerah dan untuk Kab/Kota adalah 0,16% dari total belanja daerah



HARAPAN DAN SOLUSI : STRATEGI PENGEMBANGAN SDM APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



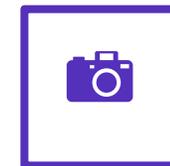
Koordinasi dan kerjasama, fasilitasi dan sinergitas program pengembangan sdm aparatur antarkementerian/lpnpk, antar-pemerintah daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga diklat lainnya



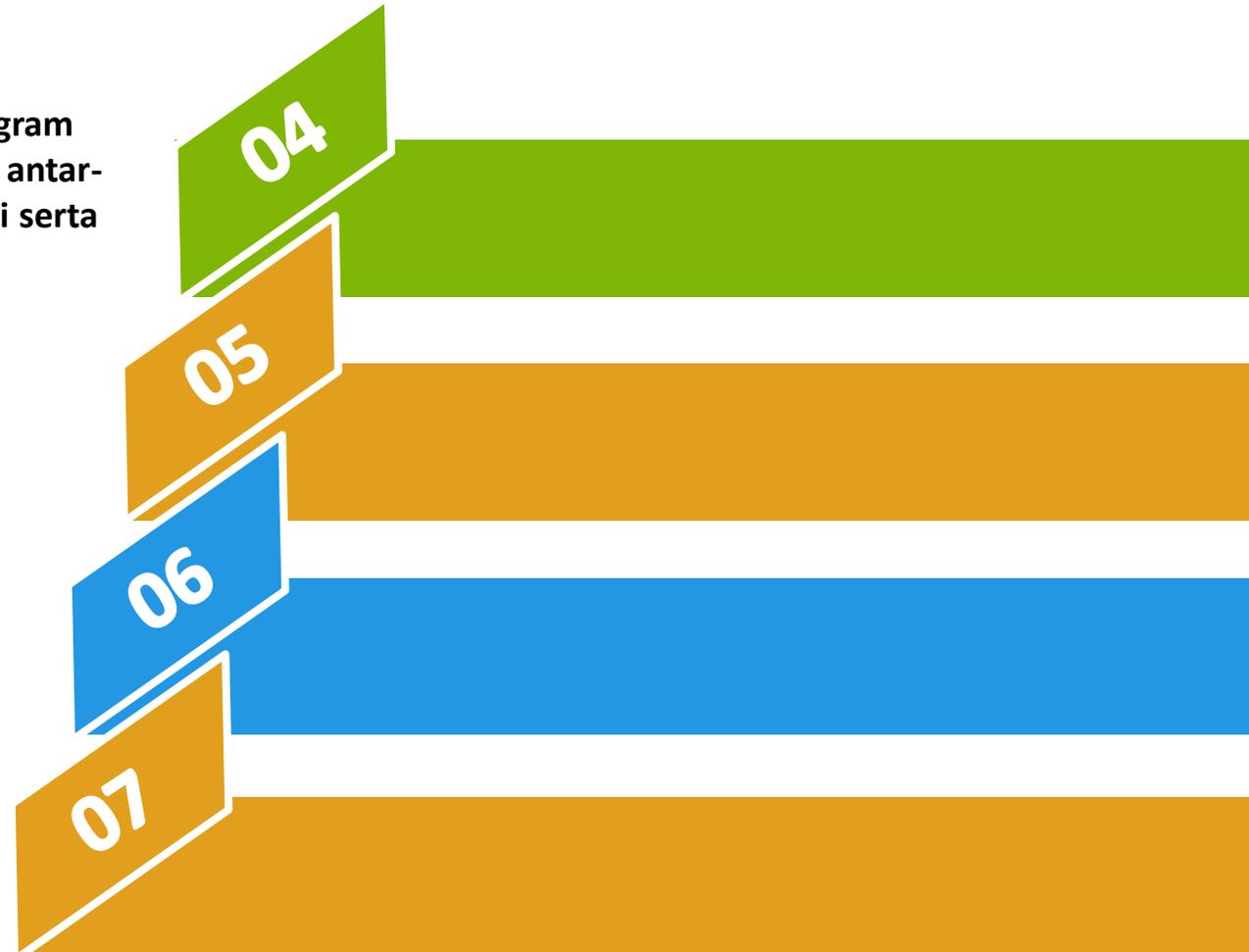
Penerapan kebijakan satu pintu (*one gate policy*) dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi untuk menjamin kualitas program, sinergitas program serta mencegah inefisiensi anggaran program/kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur.



Penyusunan standar biaya masukan umum dan khusus (sbmu/k) sebagai acuan untuk perencanaan anggaran pengembangan sdm aparatur.



Pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM APARATUR minimal 20 JP per orang per tahun





KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TERIMA KASIH